

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- TAHUN 2023 -



DPMD
Kabupaten Gowa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KATA PENGANTAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagai salah satu SKPD berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai informasi kepada publik yang menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

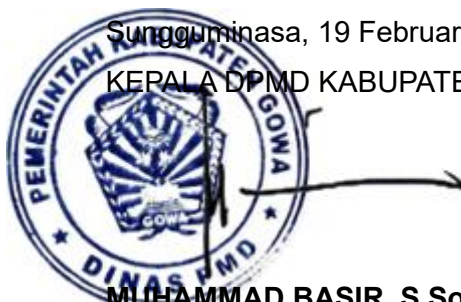
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini menyajikan beberapa hal, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2016, pada umumnya telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Gambaran tentang evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2023.
3. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2023.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Sungguminasa, 19 Februari 2024

KERALA DPMD KABUPATEN GOWA



MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690705 199009 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Gambaran Umum Organisasi.....	4
C. Isu Strategis	6
D. Strategi Organisasi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Tujuan dan Sasaran	8
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
D. Perjanjian Kinerja	13
E. Standar Penilaian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	16
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023	17
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	17
4. Realisasi Kinerja dengan Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Lainnya.....	18
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	19
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	20
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP.....	24
LAMPIRAN.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas instansi dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Kemudian, penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

Target Kinerja yang harus dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2023. Pengukuran

pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

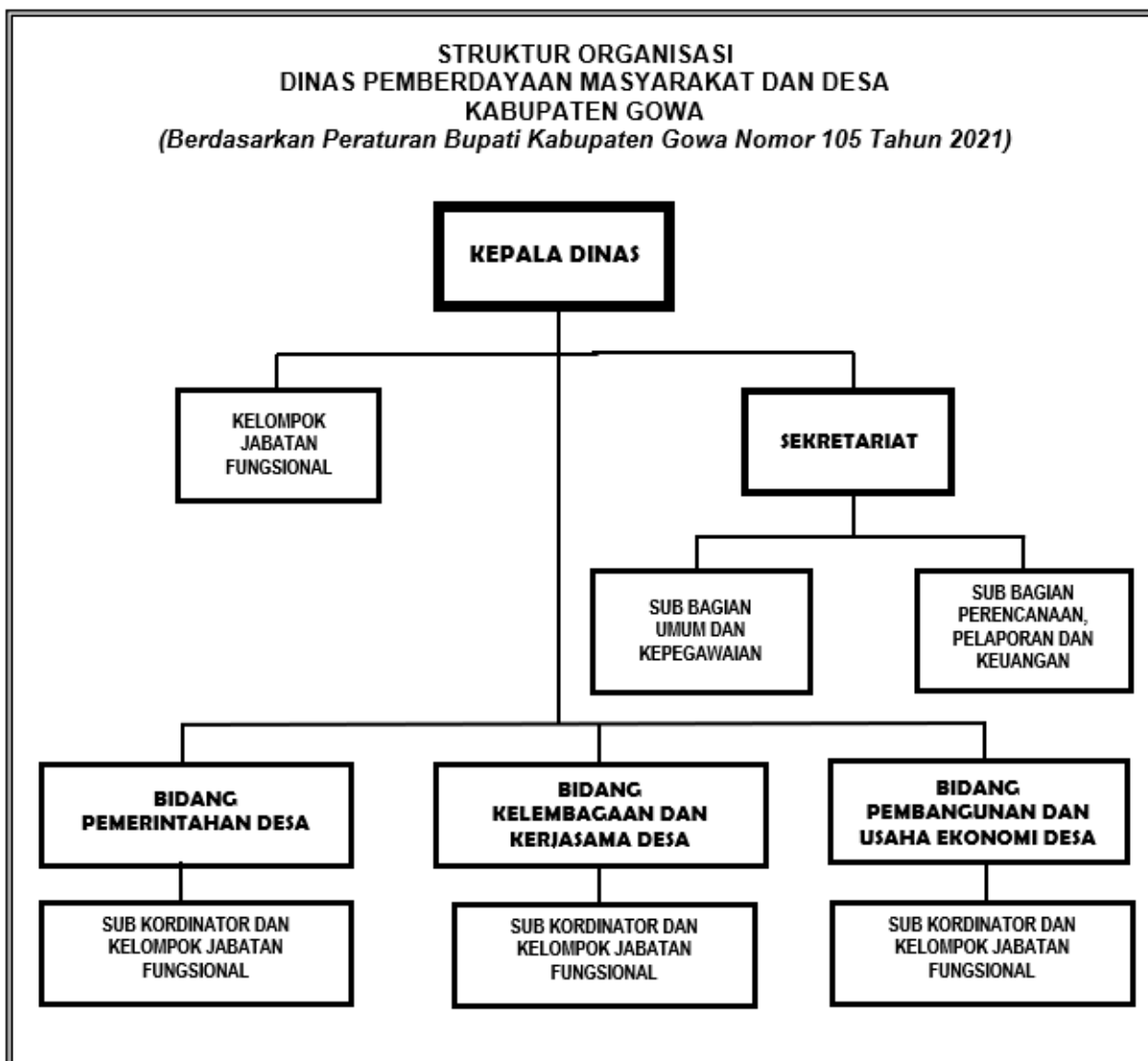
B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi



Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	(%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Strata Satu	8 Orang	47,06	
2	Strata Dua	9 Orang	52,94	
Jumlah Total		17 orang	100	

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari jumlah 18 orang pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagian besar adalah mereka yang berpendidikan Strata Satu (S-1) 8 Orang atau (47,06%), kemudian yang berpendidikan Strata Dua (S-2) sebanyak 9 orang (52,94%).

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH	(%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pembina, IV/c	1 orang	5,88%	
2	Pembina Tingkat I, IV/b	-	-	
3	Pembina, IV/a	4 orang	23,53%	
4	Penata Tingkat I, III/d	8 orang	47,06%	
5	Penata, III/c	3 orang	17,65%	
6	Penata Muda Tingkat I, III/b	1 orang	5,88%	
7	Penata Muda, III/a	-	-	
8	Pengatur Tingkat I, II/d	-	-	
9	Pengatur, II/c	-	-	
10	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	-	-	
11	Pengatur Muda, II/a	-	-	
Jumlah Total		18 Orang	100%	

menunjukkan bahwa pangkat dan golongan/ruang dari 18 orang pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagian besar adalah Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 1 orang (5,88%), Penata (III/c) sebanyak 3 orang (17,65%), Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 8 orang (47,06%) sedangkan pegawai yang berpangkat Pembina (IV/a) 4 orang (23,53%) dan Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang (5,88%).

C. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di antaranya adalah:

1. Masih rendahnya sinergisitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap program yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Banyaknya inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) yang tidak teridentifikasi di tingkat desa.

3. Masih terbatasnya sumber daya manusia di desa yang mampu mengelola BUMDes secara profesional.
4. Sebagian BUMDes yang ada saat ini belum memiliki jaringan dan pemasaran yang luas untuk pengembangan usaha.
5. Kurangnya kompetensi, kualifikasi dan motivasi pengelola LPM terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
6. Belum maksimalnya peran Kelembagaan ditingkat desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. Strategi Organisasi

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada aspek internal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti melakukan pembinaan secara rutin ke 121 Desa berupa pelatihan, bimbingan teknis serta sosialisasi.

Selain itu, data dan informasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan

A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021–2026 mengacu pada Misi ke 3, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

- Misi ke 3 : Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan
- Tujuan : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat
- Sasaran : Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di antaranya adalah:

- Tujuan : Meningkatkan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan, indikator tujuan dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima yakni 100% atau total desa mandiri tahun akhir renstra dibagi total desa yang berstatus mandiri.
- Sasaran : 1. Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa

- Indikator : a) Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa, dengan target 100% atau 121 desa yang memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang baik pada tahun 2026.
- b) Tersedianya LPM berprestasi, dengan target 13,22% atau 16 LPM berprestasi pada tahun 2026.
- c) Tersedianya PKK aktif, dengan target 100% atau 186 PKK aktif pada tahun 2026.
- d) Tersedianya Badan Permusyawaratan Desa yang aktif, dengan target 100% atau 121 laporan kinerja yang disampaikan ke Bupati pada tahun 2026.
- e) Tersedianya Posyandu Mandiri, dengan target 39,72% atau 315 posyandu mandiri pada tahun 2026.
- f) Meningkatnya pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat, dengan target 100% atau 121 desa yang melaksanakan bulan kegiatan gotong royong pada tahun 2026.
- g) Meningkatnya keterwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa, dengan target 27,27% atau 22 keterwakilan unsur masyarakat dalam musyawarah desa pada tahun 2026.
- h) Meningkatnya jumlah unit usaha BUMDesa, dengan target 33,33% atau 121 unit usaha BUMDesa yang aktif pada tahun 2026.
- i) Meningkatnya pendapatan BUMDesa, dengan target 14,78% atau Rp.340.000.000,00 pendapatan BUMDesa pada tahun 2026.
- Sasaran : 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
- Indikator : a) Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan, dengan target 3 dokumen pada tahun 2026.
- b) Terlaksananya monitoring program dan kegiatan, dengan target 4 kegiatan monitoring pada tahun 2026.
- c) Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan, dengan target 4 kegiatan monitoring pada tahun 2026.

- d) Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring, dengan target 100% atau keseluruhan pegawai yang dilakukan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan monitoring pada tahun 2026.
- e) Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi, dengan target 6 dokumen laporan kinerja pegawai yang terverifikasi pada tahun 2026.
- f) Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan, dengan target 1 dokumen laporan kinerja pegawai pada tahun 2026.

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	28,10 (34 Desa Mandiri)	43,80 (53 Desa Mandiri)	52,07 (63 Desa Mandiri)	60,33 (73 Desa Mandiri)	68,60 (83 Desa Mandiri)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	BB (Nilai Absolut 70-80)	BB (Nilai Absolut 70-80)	A (Nilai Absolut 80-90)	A (Nilai Absolut 80-90)	A (Nilai Absolut 80-90)

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

Sasaran strategis “Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa” dengan strategi Meningkatkan sarana dan prasarana kantor desa, Peningkatan LPM Berprestasi, Peningkatan PKK Aktif, Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Peningkatan Posyandu Mandiri, Meningkatnya pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat, Meningkatnya keterwakilan unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa, Peningkatan jumlah unit usaha BUMDesa, dan Meningkatkan pendapatan BUMDesa.

Sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa” dengan strategi Pemenuhan dokumen perencanaan sesuai ketentuan, Penguatan monitoring program dan kegiatan, Penguatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan, Penguatan tindak lanjut hasil monitoring, Penguatan laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi, Penguatan laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis “Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa” dengan arah kebijakan Penguatan sarana dan prasarana kantor desa, Penguatan pengurus LPM, Penguatan pengurus PKK, Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Penguatan Pengurus Posyandu, Penguatan pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat di desa, Penguatan keterwakilan unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa, Penguatan pembentukan unit usaha BUMDesa, dan Penguatan BUMDesa.

Sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa” dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas perencanaan sesuai ketentuan, Peningkatan monitoring program dan kegiatan, Peningkatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan, Peningkatan tindak lanjut hasil monitoring, Peningkatan kualitas laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi, Peningkatan kualitas laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja SKPD pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama SKPD ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 410/45/XII/DPMD Tahun 2021, dan mengalami perubahan pada Tahun 2022 dengan Nomor 410/085a/IV/DPMD/2022 Tahun 2022, dan mengalami perubahan kembali pada Tahun 2023 dengan Nomor 000.9.6.3/015/DPMD. Adapun indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

Tabel 2.2.a
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	12,40 (15 Desa Mandiri)	14,05 (17 Desa Mandiri)	16,53 (20 Desa Mandiri)	18,18 (22 Desa Mandiri)	19,01 (23 Desa Mandiri)

Tabel 2.2.b
Perubahan Ke-1 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Berkembangnya Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6836	0,6912	0,6988	0,7064	0,714

Tabel 2.2.c
Perubahan Ke-2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	28,10 (34 Desa Mandiri)	43,80 (53 Desa Mandiri)	52,07 (63 Desa Mandiri)	60,33 (73 Desa Mandiri)	68,60 (83 Desa Mandiri)

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa pada tahun 2023 mengalami perubahan. Indikator Kinerja Utama yang telah disusun dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa pada bulan Desember 2021, kemudian dilakukan revisi pada bulan April 2022, kemudian dilakukan revisi kembali pada bulan Juli 2023 untuk menyesuaikan dengan Keputusan Bupati Gowa Nomor 448/IX/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Pada perubahan pertama dianggap bahwa Indikator Kinerja Utama SKPD harus sesuai dengan Indikator Sasaran pada RPJMD Kabupaten “Berkembangnya Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan” dengan indikator kinerja “Indeks Desa Membangun” sehingga dilakukan perbaikan.
2. Pada perubahan kedua perbaikan indikator kinerja utama menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 44B/IX/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Sasaran “Meningkatnya Status Kemandirian Desa” dengan indikator “Persentase Desa Mandiri”.

3. Penyesuaian ulang terhadap target capaian karena target tahun akhir sudah tercapai pada tahun awal, sehingga target capaian dilakukan peningkatan.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan : Meningkatkan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan, indikator tujuan dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima yakni 100% atau total desa mandiri tahun akhir renstra dibagi total desa yang berstatus mandiri.

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	Nilai/ Kategori BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.308.668.073
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	43,80% (53 Desa Mandiri)	Program Penataan Desa	15.000.000
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	180.692.400
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.778.307.040
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.664.954.300

Sasaran strategis 1 yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar

Rp.4.308.668.073,00. Berikut rincian anggaran untuk masing-masing sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sasaran strategis 2 yakni meningkatnya status kemajuan kemandirian desa didukung oleh program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program peningkatan kerja sama desa dengan total anggaran sebesar Rp.4.638.953.740,00.

Tabel 2.4

Rincian anggaran sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	4.308.668.073
2.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	4.638.953.740

Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2023 mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan Agustus 2023 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilakukan revisi kembali untuk menyesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis atau indikator kinerja sebelumnya adalah meningkatnya status kemajuan kemandirian desa. sasaran kinerja/indikator kinerja tersebut belum SMART sehingga dilakukan perbaikan.
2. Penambahan kinerja pada sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Terjadinya perubahan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023, sehingga membutuhkan penyesuaian kembali.

E. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan

atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rincian anggaran sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nilai	Pencapaian
110 Ke atas	Sangat tercapai / Sangat Berhasil
$90 < X < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 < X < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$X < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain:

- Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja tahun anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	BB	N/A	N/A	N/A
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa mandiri	43,80% (53 Desa)	44,63% (54 Desa)	101,89%	Target Tercapai

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dengan indikator Nilai SAKIP belum dapat bisa diperoleh sehingga capaian kinerja pun belum bisa diukur, mengingat indikator Nilai SAKIP merupakan indikator kinerja tambahan dari indikator kinerja utama Persentase Desa Mandiri, maka capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator kinerja utama mempunyai **keberhasilan sebesar** 101,89% pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,89%.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	BB (79,31 Poin)	BB (79,50 Poin)	N/A				100%	N/A			
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa mandiri	9,92% (12 Desa Mandiri)	28,10% (34 Desa Mandiri)	44,63% (54 Desa Mandiri)				100%	101,89%			

Pengukuran kinerja dari tahun 2022–2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

- a) **Sasaran strategis:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
 - **Indikator kinerja 1:** Nilai SAKIP, Pada tahun 2022 diperoleh realisasi Nilai SAKIP BB dari target BB sehingga diperoleh capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2023 realisasinya belum bisa diperoleh, sehingga capaian kerjanya belum bisa diukur.
- b) **Sasaran strategis:** Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa
 - **Indikator kinerja 2:** Persentase Desa mandiri, Terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 1,89% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 28,10% (34 Desa Mandiri) dari target 28,10% (34 Desa Mandiri) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dan pada tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 44,63% (54 Desa Mandiri) dari target 43,80% (53 Desa Mandiri) sehingga diperoleh capaian kinerja 101,89%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	A (Nilai Absolut 80-90)	BB (79,50)	N/A			
2	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	68,60% (83 Desa Mandiri)	28,10% (34 Desa Mandiri)	44,63% (54 Desa Mandiri)			

Indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2023 belum dapat diperoleh karena nilai realisasinya baru akan bisa didapatkan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang pada saat Laporan ini dibuat LHE belum diterima, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan. Sedangkan untuk Indikator kinerja Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 44,63% (54 Desa Mandiri), terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan semakin mendekati Target Jangka Menengah. Mengindikasikan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai Target Jangka Menengah.

4. Realisasi Kinerja dengan Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	STANDAR NASIONAL	
			2023	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	N/A	-	-
2	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa mandiri	44,63% (54 Desa Mandiri)	-	-

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan

indikator kinerja Nilai SAKIP dan sasaran strategis Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa dengan indikator kinerja Persentase Desa Mandiri tidak mengikuti standar nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, capaiannya belum dapat diperoleh karena nilai realisasinya baru akan bisa didapatkan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang pada saat Laporan ini dibuat LHE belum diterima.
 - Indikator : Nilai SAKIP **Belum dapat dikukur**
- 2) Sasaran strategis: Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa, capaian 101,89% sesuai yang diperjanjikan dan dapat dicapai secara maksimal (100%) karena intensnya pendampingan bersama dengan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang bekerja di bawah naungan kementerian desa untuk pencapaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang belum tercapai dari tahun sebelumnya.
 - Indikator : Persentase Desa mandiri, (**Berhasil**) telah tercapai lebih dari 100% sesuai dengan target yaitu 44,63% (54 Desa Mandiri) dari target 43,80% (53 Desa Mandiri) sehingga diperoleh capaian kinerja 101,89%.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan program kegiatan

Tabel 3.5

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	BB	N/A	N/A	4.308.668.073	3.922.547.553	91,04%	N/A
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa mandiri	43,80% (53 Desa Mandiri)	44,63% (54 Desa Mandiri)	107,89%	4.638.953.740	3.897.835.733	84,02%	17,87%

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif
 < 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Nilai SAKIP capaiannya belum dapat diperoleh karena nilai realisasinya baru akan bisa didapatkan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang pada saat Laporan ini dibuat LHE belum diterima, dengan capaian anggaran 91,04%, sehingga tingkat efektivitas dan efisiensinya belum dapat diukur.
- 2) Indikator Persentase Desa Mandiri dengan capaian kinerja 101,89% dan capaian anggaran 84,02%, menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 17,87%. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana sudah efektif dan efisien.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.6

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	BB (100%)	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%	100%	100%	Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024	
				Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	100%	100%	100%		
				Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	1 Laporan	1 Laporan	100%		
Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	44,63% (54 Desa Mandiri) (101,89%)	<ul style="list-style-type: none"> Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Penataan Desa 	Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	100%	100%	100%		
				<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Peningkatan Kerja Sama Desa 	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	100%	100%		100%
			<ul style="list-style-type: none"> Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Peningkatan Kerja Sama Desa 		Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	100%	100%		100%

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator 1:

Nilai SAKIP, dengan target Predikat BB (nilai absolut 70-80) saat ini hasil capaiannya belum dapat diketahui karena belum menerima LHE.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 2:

Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa

Indikator 1:

Persentase Desa mandiri, dengan target 43,80% (53 Desa Mandiri) telah **berhasil** tercapai sebesar 44,63% (54 Desa Mandiri) atau tercapai 101,89% Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penataan Desa
- Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah:

- Mempertahankan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan di setiap Bidang teknis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Melaksanakan pertemuan atau rapat koordinasi per triwulan di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk peningkatan akuntabilitas kinerja

Sasaran 2: Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah:

- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan langsung ke Pemerintahan Desa bersama para TIM pendamping desa dari Kemendes dalam rangka peningkatan capaian 3 variabel IDM (Ekologi, Sosial, dan Ekonomi)

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 87,40% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	4.308.668.073	3.922.547.553	91,04%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.308.668.073	3.922.547.553	91,04%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.895.800	35.163.200	97,96%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.085.707.113	1.709332.648	81,95%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.950.000	65.950.000	98,06%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.767.465.760	1.765.659.555	99,90%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.598.500	168.021.400	96,79%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.380.000	50.234.850	99,71%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.670.900	128.485.900	99,86%
2.	Sasaran: Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	4.638.953.740	3.897.835.733	84,02
	Program Penataan Desa	15.000.000	14.824.950	98,83%
	Penyelenggaraan Penataan Desa	15.000.000	14.824.950	98,83%
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	180.692.400	180.539.000	99,92%
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	180.692.400	180.539.000	99,92%
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.778.307.040	2.545.368.818	91,62%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.778.307.040	2.545.368.818	91,62%
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.664.954.300	1.157.102.965	69,50%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.664.954.300	1.157.102.965	69,50%
	TOTAL	8.947.621.813	7.820.383.286	87,40%

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Laporan ini juga berfungsi sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa di tahun mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa telah berhasil melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercatat dalam 7 (tujuh) analisis, yang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek kinerja, seperti efisiensi penggunaan anggaran (12,60%) dan peningkatan capaian kinerja utama di tahun 2023 sebesar 1,89% dari tahun sebelumnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa menetapkan sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa” dengan indikator kinerja Nilai SAKIP kinerjanya belum dapat diukur namun memiliki efisiensi anggaran sebesar 8,96% dan sasaran strategis “Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa” dengan indikator kinerja Persentase Desa mandiri yang berhasil dicapai dengan capaian kinerja 101,89% dengan efisiensi anggaran sebesar 17,87%.

Meskipun demikian, kami juga mengakui bahwa masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama terkait dengan pencapaian target jangka menengah dan peningkatan keterukuran dengan standar nasional.

Penyerapan anggaran belanja langsung dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp.8.947.621.813,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.7.820.383.286,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau persentase capaian sebesar 87,40%.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

- a. Mempertahankan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Melaksanakan pertemuan atau rapat koordinasi per triwulan di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan langsung ke Pemerintahan Desa bersama para TIM pendamping desa dari Kemendes dalam rangka peningkatan capaian 3 variabel IDM (Ekologi, Sosial, dan Ekonomi).

LAMPIRAN



**RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13								7,062,938,662	7,914,363,863	7,914,363,863				7,060,238,662				
2	13	01							2,727,721,163	4,257,786,423	4,257,786,423			100 %	2,725,021,163				
2	13	01	2.01						34,000,000	71,655,800	71,655,800			100 %	34,000,000				
2	13	01	2.01	01								Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Dinas PMD Kab. Gowa	5 Laporan	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	06								Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PK.5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas PMD Kab. Gowa	4 Laporan	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02						2,111,867,965	2,245,081,963	2,245,081,963						100 %	2,111,867,965	
2	13	01	2.02	01								Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PK.5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Dinas Pemberdaya aan Masyarakat dan Desa	14 Orang/Bulan	2,075,254,330	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	03								Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Dinas Pemberdaya aan Masyarakat dan Desa	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	05								Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Dinas Pemberdaya aan Masyarakat dan Desa	1 Laporan	5,463,635	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	16,150,000	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17 Laporan	16,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	71,600,000	69,050,000	69,050,000						100 %	71,600,000	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	21 Paket	28,000,000	69,050,000	69,050,000	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pelayanan Administrasi Kepegawaian	21 Paket	28,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	17,000,000	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Orang	17,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				28 Orang	28 Orang	26,600,000	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pelayanan Administrasi Kepegawaian	28 Orang	26,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	281,209,205	1,542,059,760	1,542,059,760						100 %	278,509,205	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				634 Paket	634 Paket	13,000,000	27,343,760	27,343,760	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	634 Paket	10,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Dokumen	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	34,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				68 Laporan	68 Laporan	7,650,000	216,729,000	216,729,000	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68 Laporan	7,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1742 Laporan	1742 Laporan	155,559,205	1,197,987,000	1,197,987,000	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1742 Laporan	155,559,205	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	36,000,000	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	36,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan % barang milik daerah			%	100 %	100 %	198,136,428	148,888,000	148,888,000						100 %	198,136,428	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	21,910,825	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Unit	21,910,825	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	14,631,924	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Unit	14,631,924	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	150,000,000	124,788,600	124,788,600	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Unit	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	11,593,679	24,099,400	24,099,400	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PK.5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 Unit	11,593,679	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	16,606,063	52,380,000	52,380,000						100 %	16,606,063	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	2,293,853	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1000 Laporan	2,293,853	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	11,034,029	52,380,000	52,380,000	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Laporan	11,034,029	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3,278,181	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 Laporan	3,278,181	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	14,301,502	128,670,900	128,670,900						100 %	14,301,502	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	7,811,687	86,480,900	86,480,900	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Unit	7,811,687	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	1,283,954	42,190,000	42,190,000	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 Unit	1,283,954	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 13 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	5,205,861	0	0	Kab. Gowa Somba Ujung Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6 Unit	5,205,861	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa	%		%	100 %	100 %	80,000,000	0	15,000,000						100 %	80,000,000	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	%		%	100 %	100 %	80,000,000	0	15,000,000						100 %	80,000,000	
2 13 02 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya				30 Desa	121 Desa	40,000,000	0	15,000,000	Kab. Gowa Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PK.4. Pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	0	121 Desa	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 02 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Kewenangannya				30 Desa	30 Desa	40,000,000	0	0	Kab. Gowa Somba Ujung Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	30 Desa	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa Yang Dibina	%		%	100 %	100 %	860,764,641	140,272,400	140,272,400						100 %	860,764,641	
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Pesentase Desa Yang Terasilitasi	%		%	100 %	100 %	860,764,641	140,272,400	140,272,400						100 %	860,764,641	
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				34 Dokumen	34 Dokumen	6,569,775	29,102,900	29,102,900	Kab. Gowa Somba Ujung Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PK.4. Pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	121 Desa	34 Dokumen	6,569,775	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				121 Dokumen	121 Dokumen	6,556,362	0	0	Kab. Gowa Somba Ujung Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		121 Desa	121 Dokumen	6,556,362	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	2 Dokumen	847,638,504	111,169,500	111,169,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gowa Bontonompo, Bontonompo Kab. Gowa Bontonompo, Tamallayang Kab. Gowa Bontonompo, Bontolangkasa Utara Kab. Gowa Bontonompo, Bontolangkasa Selatan Kab. Gowa Bontonompo, Barebeng Kab. Gowa Bontonompo, Manjapai Kab. Gowa Bontonompo, Bontobiraeng Kab. Gowa Bontonompo, Romanglasa Kab. Gowa Bontonompo, Katangka Kab. Gowa Bontonompo, Bulogading Kab. Gowa Bontonompo, Bategulung Kab. Gowa Bontonompo, Kalabarembeng Kab. Gowa Bontonompo, Bontobiraeng Selatan Kab. Gowa Bajeng, Mata Allo Kab. Gowa Bajeng, Bontosunggu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PK.4. Pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	121 Desa	2 Dokumen	847,638,504	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
2	13	04									Kab. Gowa Biringbulu, Pencong Kab. Gowa Biringbulu, Berutallasa Kab. Gowa Biringbulu, Parangloe Kab. Gowa Biringbulu, Baturappe Kab. Gowa Biringbulu, Batumalompo Kab. Gowa Biringbulu, Borimasunggu Kab. Gowa Biringbulu, Lembangde Kab. Gowa Biringbulu, Julukanaya Kab. Gowa Barombong, Kanjilo Kab. Gowa Barombong, Moncobalang Kab. Gowa Barombong, Tinggimae Kab. Gowa Barombong, Biringngala Kab. Gowa Barombong, Tamanyeleng							100 %	2,932,999,276	
2	13	04	2.01														100 %	2,932,999,276		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				121 Dokumen	121 Dokumen	5,556,362	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			121 Pemerintah an Desa	121 Dokumen	5,556,362	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				121 Dokumen	121 Dokumen	11,556,362	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		121 Pemerintah an Desa	121 Dokumen	11,556,362	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa				121 Dokumen	121 Dokumen	36,050,000	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		121 Pemerintah an Desa	121 Dokumen	36,050,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				259 Orang	259 Orang	386,659,901	2,431,182,000	2,416,182,000	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PK.5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	121 Pemerintah an Desa	259 Orang	386,659,901	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				121 Dokumen	121 Dokumen	60,300,000	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			121 Pemerintah an Desa	121 Dokumen	60,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				121 Dokumen	121 Dokumen	54,335,705	236,800,000	236,800,000	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PK.4. Pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	121 Pemerintah an Desa	121 Dokumen	54,335,705	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Penggangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Penggangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				54 Laporan	54 Laporan	2,010,000,000	0	0	Kab. Gowa Bontonompo, Bontolangsela, Kab. Gowa Bontonompo, Manjapai Kab. Gowa Bontonompo, Romanglase Kab. Gowa Bajeng, Bontosunggu Kab. Gowa Bajeng, Pabenteng Kab. Gowa Bajeng, Maradekaya Kab. Gowa Bajeng, Panciro Kab. Gowa Bajeng, Lempang Kab. Gowa Bajeng, Bone Kab. Gowa Bajeng, Parikatte Kab. Gowa Tompobulu, Rappolemba Kab. Gowa Tinggimong, Parigi Kab. Gowa Parangloe, Lonjoboko Kab. Gowa Bontomarannu, Nirannuang Kab. Gowa Bontomarannu, Romangloe Kab. Gowa Bontomarannu, Mata Allo Kab. Gowa Palangga, Bontoala Kab. Gowa Palangga, Julubori Kab. Gowa Palangga, Kampili Kab. Gowa Palangga, Panakkukang	Dana Transfer Kasum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	121 Pemerintah an Desa	54 Laporan	2,010,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							121 Laporan	121 Laporan	62,360,000	0	0	Kab. Gowa, Somba Upu, Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			121	Pemerintah an Desa	121 Laporan	62,360,000	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							121 Dokumen	121 Dokumen	16,390,905	0	0	Kab. Gowa, Somba Upu, Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		121	Pemerintah an Desa	121 Dokumen	16,390,905	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa				121 Dokumen	121 Dokumen	65,156,347	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		121 Pemerintah an Desa	121 Dokumen	65,156,347	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Yang Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti PembinaanPeningkatan Kapasitas				121 Orang	121 Orang	58,458,154	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		121 Pemerintah an Desa	121 Orang	58,458,154	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				121 Desa	121 Desa	60,300,000	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			121 Pemerintah an Desa	121 Desa	60,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				121 Laporan	121 Laporan	20,300,000	0	0	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			121 Pemerintah an Desa	121 Laporan	20,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				121 Dokumen	121 Dokumen	85,575,540	104,316,040	104,316,040	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PK.5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	121 Pemerintah an Desa	121 Dokumen	85,575,540	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	%		%	100 %	100 %	461,453,582	744,007,000	744,007,000					100 %	461,453,582		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	%		%	100 %	100 %	461,453,582	744,007,000	744,007,000					100 %	461,453,582			
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				167 Dokumen	167 Dokumen	104,308,154	0	0	Kab. Gowa Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	167 Dokumen	104,308,154	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1127 Lembaga	1127 Lembaga	104,894,534	249,360,600	249,360,600	Kab. Gowa Somba Upu, Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PK.2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan inklusif		Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	1127 Lembaga	104,894,534	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	26,748,427	0	0	Kab. Gowa Somba Upu, Sungguminasa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	36 Dokumen	26,748,427	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				20 Laporan	20 Laporan	48,970,290	32,258,000	32,258,000	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PK.1. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	20 Laporan	48,970,290	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan BhaktiGotong Royong Masyarakat				121 Laporan	121 Laporan	61,532,177	10,118,400	10,118,400	Kab. Gowa Somba Upu Sungguminasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PK.5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	121 Laporan	61,532,177	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				3 Dokumen	3 Dokumen	115,000,000	452,270,000	452,270,000	Kab. Gowa Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PK.4. Pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	3 Dokumen	115,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TOTAL								7,062,938,662	7,914,363,863	7,914,363,863							7,060,238,662	



**PERNYATAAN DAN
PERJANJIAN
KINERJA TAHUN
2024**



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH.,MH.

Jabatan : Bupati Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH., MH.



PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD BASIR, S.Sos.,M.AP

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	Nilai/Kategori A
2.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	52.07%

	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.946.706.912
2.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp.	209.139.100
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	3.184.396.140
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	1.985.053.920

Sungguminasa, 04 Januari 2024

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH., MH.



Pimpinan Unit Kerja

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terdapat kesadaran dan upaya untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pencapaian hasil kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini dapat mencakup peningkatan transparansi, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pelayanan dan program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dipertanggungjawabkan secara efektif kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan di tahun 2024.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu atas laporan kinerja instansi kinerja pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Nilai SAKIP	Data perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan	Nilai SAKIP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip	A	Nilai SAKIP yang ditetapkan di tahun 2024 dengan predikat A atau nilai absolut antara 80-90 dengan interpretasi MEMUASKAN, dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat tercapai sesuai target. Sedangkan pada tahun sebelumnya ditetapkan target Nilai SAKIP dengan predikat BB atau dengan nilai absolut antara 70-80 dengan interpretasi SANGAT BAIK.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah perkembangan atau peningkatan dalam hal kemandirian yang dapat dilihat dari 3 pilar utama yaitu pengukuran kesejahteraan dan pembangunan desa (sosial, ekonomi, dan ekologi). Peningkatan status

kemajuan kemandirian desa dapat diartikan sebagai pencapaian positif dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase Desa Mandiri	Desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta pelayanan pemerintahan yang sudah sangat baik	(Jumlah Desa mandiri / jumlah seluruh desa) x 100%	Bidang Pemerintahan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Desa Mandiri	52.07%	Persentase desa mandiri di tahun 2024 ditetapkan target 52.07% atau 63 desa Mandiri dari 121 Desa di Kabupaten Gowa dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat tercapai 100% sesuai target. Sedangkan pada tahun sebelumnya ditetapkan target Persentase desa mandiri di tahun 2023 ditetapkan target 43.80% atau 53 desa Mandiri dari 121 Desa di Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Mesjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. RUMAISAH, SKM., MM.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024



PIHAK KEDUA
MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

PIHAK PERTAMA,

Hj. RUMAISAH, SKM., MM.
Pangkat : Pembina
NIP : 19720327 199503 2 002

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN PROGRAM			
1	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%
SASARAN KEGIATAN			
1.a	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan	3 Dokumen
1.b	Terlaksananya monitoring program dan kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan	4 Kegiatan
SASARAN PROGRAM			
2	Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai	Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	100%
SASARAN KEGIATAN			
2.a	Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan	Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi	4 Kegiatan
2.b	Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring	Persentase kinerja pegawai yang ditindaklanjuti	100%
SASARAN PROGRAM			
3	Meningkatnya kualitas laporan kinerja	Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	1 Laporan
SASARAN KEGIATAN			
3.a	Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi	Jumlah dokumen yang diverifikasi	6 Dokumen
3.b	Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan	1 Laporan

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.946.706.912

Sungguminasa, 04 Januari 2024



Atasan Pimpinan Unit Kerja

M. HAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

Pimpinan Unit Kerja

Hj. RUMAISAH, SKM., MM.
Pangkat : Pembina
NIP : 19720327 199503 2 002

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan dalam sasaran kinerja ini adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran pada sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menunjukkan keteraturan dan keselarasan antara apa yang telah direncanakan sebelumnya dengan apa yang terjadi selama pelaksanaan. Kesesuaian ini penting untuk memastikan bahwa tujuan perencanaan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	Dokumen Renja, RKA awal, dan RKA Perubahan	(Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan / Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%	Target capaian pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100% atau terselesaikannya dokumen Renja, RKA awal, dan RKA perubahan. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan target capaian 100% atau terselesaikannya dokumen Renja, RKA awal, dan RKA perubahan.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pelaksanaan proses evaluasi kinerja pegawai untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pegawai dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Peningkatan dalam proses evaluasi kinerja dapat mencerminkan komitmen organisasi untuk meningkatkan pengelolaan dan penilaian kinerja pegawai yang lebih efektif. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reuvi atas laporan kinerja instansi kinerja pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

3. Keputusan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 789/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024
4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
5. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 900.1.7.1/004/DPMD Tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> • LAKIP • DPA Awal dan DPA Perubahan 	(Jumlah laporan kinerja pegawai yang terselesaikan / jumlah Laporan Kinerja Pegawai sesuai ketentuan) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	100%	Target capaian pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100% atau terselesaikannya dokumen LAKIP, DPA awal, dan DPA perubahan. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan target capaian 100% atau terselesaikannya dokumen LAKIP, DPA awal, dan DPA perubahan.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas laporan kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan pelaporan hasil kerja dan pencapaian program dan diharapkan dapat membawa manfaat positif dalam membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan efisiensi operasional dalam mencapai tujuan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu atas laporan kinerja instansi kinerja pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	Penyelesaian laporan akuntabilitas kinerja pegawai (LAKIP)	(Jumlah laporan kinerja yang terselesaikan / jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	1 Laporan	Target capaian pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 1 laporan atau terselesaikannya LAKIP sesuai regulasi. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan target capaian 1 laporan atau terselesaikannya LAKIP sesuai regulasi.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Mesjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIATI, S.Sos.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024



MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690705 199009 1 002

PIHAK PERTAMA,

YULIATI, S.Sos.

Pangkat : Pembina

NIP : 19680607 198903 2 014

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana kantor Desa	Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	100%
SASARAN KEGIATAN			
1.a	Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa	Cakupan sarana dan prasaran perkantoran pemerintah desa yang baik	100%

Program	Anggaran
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.795.274.740

Sungguminasa, 04 Januari 2024



Atasan Pimpinan Unit Kerja

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

Pimpinan Unit Kerja

YULIATI, S.Sos.
Pangkat : Pembina
NIP : 19680607 198903 2 014

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersediannya sarana dan prasarana kantor desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di kantor desa yang memiliki dampak penting terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Fasilitas yang memadai dapat meningkatkan produktivitas aparat desa dan memastikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga dapat mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk menyediakan lingkungan kerja yang baik dan mendorong pelayanan publik yang berkualitas. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBDesa 2024.
5. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	Sarana dan prasarana kantor desa yang dapat digunakan dalam proses pelayanan	(Jumlah sarana dan prasarana kantor desa yang baik / jumlah keseluruhan kantor desa) x 100%	Bidang Pemerintahan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	100%	Target capaian pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik ditetapkan target sebesar 100% dapat berfungsi. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik sebesar 100% dapat berfungsi.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Mesjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. MANGNGAI RAJA

Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024



MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690705 199009 1 002

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. MANGNGAI RAJA

Pangkat : Pembina

NIP : 19671015 199710 1 001

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	100%
SASARAN KEGIATAN			
1.a	Tersedianya LPM berprestasi	Persentase LPM berprestasi	13.22%
1.b	Tersedianya PKK aktif	Persentase PKK aktif	100%
1.c	Tersedianya Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	Persentase Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	100%
1.d	Tersedianya posyandu mandiri	Persentase posyandu mandiri	37.20%

Program	Anggaran
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 127.197.400
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.833.177.920
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 84.444.300

Sungguninasa, 04 Januari 2024



Atasan/Pimpinan Unit Kerja

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

Pimpinan Unit Kerja

Drs. H. MANGNGAI RAJA
Pangkat : Pembina
NIP : 19671015 199710 1 001

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mencerminkan pelaksanaan upaya yang ditujukan untuk memberikan dukungan dan memperkuat peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal. Pemberdayaan ini melibatkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian lembaga dan masyarakat setempat. Dengan mendorong pemberdayaan masyarakat hukum adat, pengakuan terhadap nilai-nilai tradisional, dan partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan, pemerintahan daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, mempertahankan keberagaman budaya, dan memperkuat fondasi partisipatif dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan ini juga mencerminkan pendekatan yang menghargai dan memanfaatkan potensi lokal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di desa/kelurahan.
4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina / jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa) x 100%	Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	100%	Target capaian pada tahun 2024 persentase lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan target sebesar 100% atau (6 Lembaga diantaranya RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, PKK, dan LPM).

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
		Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan persentase lembaga kemasyarakatan desa sebesar 100% atau (6 Lembaga diantaranya RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, PKK, dan LPM).



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Mesjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI WAHYUNI, SE., M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA,

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024



MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

PIHAK PERTAMA,

RIZKI WAHYUNI, SE., M.Si.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19840611 200901 2 010

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan Desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	100%
SASARAN KEGIATAN			
1.a	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	100%
1.b	Meningkatnya keterwakilan unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa	27.27%
SASARAN PROGRAM			
2	Meningkatnya status kemandirian BUMDesa	Persentase kemandirian BUMDesa	33,06%
SASARAN KEGIATAN			
2.a	Meningkatnya jumlah unit usaha BUMDesa	Persentase unit usaha BUMDesa yang aktif	50%
2.b	Meningkatnya pendapatan BUMDesa	Persentase pendapatan BUMDesa	17.81%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja:

	Program		Anggaran
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	261.924.000
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	151.876.000
3.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp.	124.694.800

Sungguminasa, 04 Januari 2024



Atasan Pimpinan Unit Kerja

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

Pimpinan Unit Kerja

RIZKI WAHYUNI, SE., M.Si.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19840611 200901 2 010

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap Pembangunan Desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan swadaya masyarakat menunjukkan semakin banyaknya partisipasi aktif warga dalam kegiatan pembangunan yang mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pembangunan dan terbentuknya kelompok-kelompok aktif di tingkat desa. Swadaya masyarakat dapat terwujud melalui kegiatan gotong-royong, penggalangan dana, dan keterlibatan dalam proyek-proyek lokal. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi inisiatif masyarakat, menciptakan mekanisme partisipatif, dan memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Peningkatan swadaya masyarakat dapat membawa dampak positif, seperti peningkatan kapasitas pembangunan desa, pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	Tingkat swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa	(Jumlah realisasi swadaya masyarakat terhadap pembangunan di desa / jumlah swadaya masyarakat terhadap pembangunan di desa yang direncanakan dalam APBDes) x 100%	Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	100%	Jumlah swadaya masyarakat terhadap pembangunan di desa di tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100% dari jumlah realisasi swadaya masyarakat yang direncanakan dalam APBDes. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan Jumlah swadaya masyarakat terhadap pembangunan sebesar 100% dari jumlah realisasi swadaya masyarakat yang direncanakan dalam APBDes.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya status kemandirian BUMDesa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mencerminkan kemajuan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mencapai kemandirian, khususnya dalam konteks ekonomi dan operasional. Peningkatan kemandirian finansial BUMDesa menandakan berhasilnya entitas ini dalam menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi melalui berbagai kegiatan ekonomi lokal. Selain itu, kemandirian operasional mencerminkan kemampuan BUMDesa untuk mengelola kegiatan sehari-hari tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan eksternal. Peningkatan status kemandirian juga dapat melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal, dengan melibatkan lebih banyak warga desa dalam dukungan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan BUMDesa. Keseluruhan, peningkatan status kemandirian BUMDesa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi di tingkat desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sejalan dengan upaya pemerintahan daerah untuk mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 31 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja


Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase kemandirian BUMDesa	Peningkatan PAD pemerintah desa dan peningkatan ekonomi masyarakat	(Jumlah BUMDesa mandiri / jumlah keseluruhan BUMDesa) x 100%	Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kemandirian BUMDesa	33,06%	Jumlah BUMDesa yang dapat memenuhi indikator pemeringkatan di tahun 2024 ditetapkan target sebesar 33,06% atau 40 BUMDes dapat memenuhi beberapa aspek pemeringkatan dan beralih status menjadi BUMDES Mandiri dan berkontribusi pada peningkatan PAD Desa. Sedangkan pada tahun sebelumnya Jumlah BUMDesa yang dapat memenuhi indikator pemeringkatan ditetapkan target sebesar 16,53% atau 20 BUMDes dapat memenuhi beberapa aspek pemeringkatan dan beralih status menjadi BUMDES Mandiri dan berkontribusi pada peningkatan PAD Desa.

The logo of Universitas Gowa is a shield-shaped emblem. It features a central sun with rays, a white bird (likely a Garuda) with a crown, and a book. The shield is bordered by green leaves and a yellow laurel wreath. The word "GOWA" is written in white at the bottom of the shield.

**PENGUKURAN
KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2023**

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
Sasaran Program						
1.	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%	100%	100%	Pada Dinas PMD terdapat 5 program yang tertuang DPA. Hingga akhir tahun, semua program terlaksana
Sasaran Kegiatan						
1.a.	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah Dokumen RKA awal, Renja, dan RKA Perubahan
1.b.	Terlaksananya monitoring program dan kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan monitoring yang dilakukan melalui lap. Realisasi fisik dan keuangan di setiap triwulan selama 1 tahun
Sasaran Program						
2.	Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai	Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	100%	100%	100%	Kinerja pegawai diukur melalui penyelesaian dokumen LAKIP, DPA Awal, dan DPA Perubahan sesuai target
Sasaran Kegiatan						
2.a.	Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan	Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	Monitoring dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja pegawai sesuai target PK yang dilakukan tiap triwulan
2.b.	Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring	Persentase kinerja pegawai yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Tindak lanjut hasil monitoring diukur melalui pencapaian kinerja pegawai berdasarkan PK atas keberhasilan dan kekurangan capaian kinerja di triwulan sebelumnya
Sasaran Program						
3.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja	Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	1 Laporan	1 Laporan	100%	Kualitas dokumen LKjIP dapat terukur sesuai ketentuan yang berlaku
Sasaran Kegiatan						
3.a.	Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi	Jumlah dokumen yang diverifikasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pohon Kinerja, Cascading, SOP, dan LKjIP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
3.b.	Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Dokumen LKjIP selesai sesuai ketentuan yang berlaku



KEPALA DINAS,

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

SEKRETARIS,

Hj. RUMAISAH, SKM., MM.
Pangkat : Pembina
NIP : 19720327 199503 2 002

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
Sasaran Program						
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor desa	Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	100%	100%	100%	Di Kabupaten Gowa terdapat 121 Desa yang dikunjungi
Sasaran Kegiatan						
1.a.	Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	Di Kabupaten Gowa terdapat 121 Desa dengan Sarana dan Prasaran Kantor Desa yang berfungsi dengan baik



KEPALA DINAS,

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
DESA,**

YULIATI, S.Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19680607 198903 2 014

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
Sasaran Program						
1.	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	100%	100%	100%	Terdapat 1127 lembaga (PKK, Posyandu, LPM) yang dilakukan pembinaan
Sasaran Kegiatan						
1.a.	Tersedianya LPM berprestasi	Persentase LPM berprestasi	13,22%	7,44%	56,26%	Terdapat 16 LPM dari 121 Desa di Kabupaten Gowa
1.b.	Tersedianya PKK aktif	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	Terdapat 186 PKK yang terdata di Kabupaten Gowa
1.c.	Tersedianya Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	Persentase Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	100%	100%	100%	Terdapat 121 BPD aktif di 121 Desa di Kabupaten Gowa
1.d.	Tersedianya posyandu mandiri	Persentase posyandu mandiri	35,94%	34,68%	96,49%	Terdapat 793 Posyandu yang terdata di Kabupaten Gowa



KEPALA DINAS,

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

KEPALA KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA,

Drs. H. MANGNGAI RAJA
Pangkat : Pembina
NIP : 19671015 199710 1 001

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
Sasaran Program						
1.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan Desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	100%	100%	100%	Partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan lokal mereka sendiri pada 121 Desa di Kabupaten Gowa
Sasaran Kegiatan						
1.a.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	100%	100%	100%	Terdapat 121 Desa di Kabupaten Gowa yang melaksanakan kegiatan gotong-royong
1.b.	Meningkatnya keterwakilan unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa	27.27%	27,27%	100%	22 Keterwakilan masyarakat dalam 6 musyawarah desa
Sasaran Program						
2.	Meningkatnya status kemandirian BUMDesa	Persentase kemandirian BUMDesa	16,53%	10%	60,50%	Terdapat 20 BUMDesa Mandiri dari 121 BUMDesa yang terdata di Kabupaten Gowa
Sasaran Kegiatan						
2.a.	Meningkatnya jumlah unit usaha BUMDesa	Persentase unit usaha BUMDesa yang aktif	49.59%	88,84%	179,15%	Terdapat 242 Unit Usaha BUMDesa yang terdata di Kabupaten Gowa
2.b.	Meningkatnya pendapatan BUMDesa	Persentase pendapatan BUMDesa	17.69%	5,37%	30,36%	Total keseluruhan PAD BUMDes setelah tutup buku terhadap penyertaan modal dalam 1 tahun anggaran



KEPALA DINAS,

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690705 199009 1 002

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN
DAN USAHA EKONOMI DESA,

RIZKI WAHYUNI, SE., M.Si.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19840611 200901 2 010



**RENCANA AKSI
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Mesjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PERUBAHAN RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
Sekretariat Dinas										
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	TW 1:	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	TW 1: 20%	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan	TW 1: 1 Dokumen		
		TW 2:			TW 2: 20%			TW 2: 0 Dokumen		
		TW 3:			TW 3: 40%			TW 3: 2 Dokumen		
		TW 4: BB			TW 4: 20%			TW 4: 0 Dokumen		
							Terlaksananya monitoring program dan kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan	TW 1: 1 Kegiatan TW 2: 1 Kegiatan TW 3: 1 Kegiatan TW 4: 1 Kegiatan	
			Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai	Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	TW 1: 100% TW 2: 100% TW 3: 100% TW 4: 100%	Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap	Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi	TW 1: 1 Kegiatan TW 2: 1 Kegiatan TW 3: 1 Kegiatan TW 4: 1 Kegiatan		
						Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring	Persentase kinerja pegawai yang ditindaklanjuti	TW 1: 25% TW 2: 25% TW 3: 25% TW 4: 25%		
			Meningkatnya kualitas laporan kinerja	Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	TW 1: 1 Laporan TW 2: 0 Laporan TW 3: 0 Laporan TW 4: 0 Laporan	Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi	Jumlah dokumen yang diverifikasi	TW 1: 6 Dokumen TW 2: 0 Dokumen TW 3: 0 Dokumen TW 4: 0 Dokumen		
						Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan	TW 1: 1 Laporan TW 2: 0 Laporan TW 3: 0 Laporan TW 4: 0 Laporan		
		Bidang Pemerintahan Desa								
		Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa mandiri	TW 1:	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor desa	Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	TW 1: Menyusun 1 dokumen pendataan sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa	Cakupan sarana dan prasaran perkantoran pemerintah desa yang baik	TW 1: 0%
				TW 2:			TW 2: Melakukan koordinasi dengan 60 pemerintah desa			TW 2: 0%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		TW 3:			TW 3: Melakukan koordinasi dengan 61 pemerintah desa			TW 3: 0%
		TW 4: 43.80%			TW 4: 100%			TW 4: 100%
Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa								
		Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap masyarakat	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	TW 1: 24.79% (30 Desa) TW 2: 24.79% (30 Desa) TW 3: 24.79% (30 Desa) TW 4: 25.62% (31 Desa)	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	TW 1: 0% TW 2: 0% TW 3: 0% TW 4: 100%	
					Meningkatnya keterwakilan unsur masyarakat dalam pelaksanaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan	TW 1: 0% TW 2: 0% TW 3: 13.64% TW 4: 13.64%	
		Meningkatnya status kemandirian BUMDesa	Persentase kemandirian BUMDesa	TW 1: Melaksanakan pendataan (profil BUMDes, aspek usaha, aset, modal, kelembagaan serta laba (bersih dan kotor)) TW 2: 16.53% TW 3: Melaksanakan pendataan aspek laba (kotor dan bersih) TW 4: 16.53%	Meningkatnya jumlah unit usaha BUMDesa	Persentase unit usaha BUMDesa yang aktif	TW 1: 0% TW 2: 0% TW 3: 0% TW 4: 49.59%	
					Meningkatnya pendapatan BUMDesa	Persentase pendapatan BUMDesa	TW 1: 0% TW 2: 0% TW 3: 0% TW 4: 17.69%	
Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Desa								
		Meningkatnya Lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	TW 1: Melakukan pendataan lembaga kemasyarakatan Desa TW 2: Menyusun 1 dokumen pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa TW 3: 50% (793 Posyandu)	Tersedianya LPM berprestasi	Persentase LPM berprestasi	TW 1: 0% TW 2: 0% TW 3: 13.22%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
					TW 4: 50% (167 PKK dan 167 LPM)			TW 4: 0%
						Tersedianya PKK aktif	Persentase PKK aktif	TW 1: 100% TW 2: 0% TW 3: 0% TW 4: 0%
						Tersedianya Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	Persentase Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	TW 1: 100% TW 2: 0% TW 3: 0% TW 4: 0%
						Tersedianya posyandu mandiri	Persentase posyandu mandiri	TW 1: 35.94% TW 2: 0% TW 3: 0% TW 4: 0%

Sunggalminasa, 20 Oktober 2023

Kepala DPMD



MUHAMMAD BASIR. S.Sos., M.AP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690705 199009 1 002



**PENGUKURAN
RENCANA AKSI
TAHUN 2023**



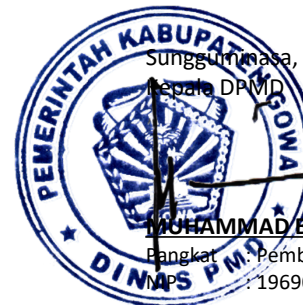
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Masjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PENGUKURAN RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Penjelasan Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Penjelasan Kinerja				
Sekretariat Dinas																		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	TW 1:	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	TW 1:	20%	TW 1:	20%	Pada Dinas PMD terdapat 5 program yang tertuang dalam DPA, dan hingga akhir tahun 2023, semua program terlaksana sesuai dengan yang sudah ditetapkan	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan	TW 1:	1 Dokumen	100%	Dokumen RKA			
		TW 2:			20%	TW 2:	20%	TW 2:				0 Dokumen	TW 2:			0 Dokumen	0%	
		TW 3:			40%	TW 3:	40%	TW 3:				2 Dokumen	TW 3:			2 Dokumen	100%	
		TW 4:			20%	TW 4:	20%	TW 4:				0 Dokumen	TW 4:			0 Dokumen	0%	
	BB	Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai	Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	TW 1:	100%	TW 1:	100%	Pada Dinas PMD terdapat 17 Pegawai yang telah bekerja sesuai target SKP dan telah terlaksana sampai akhir tahun anggaran	Terlaksananya monitoring program dan kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan	TW 1:	1 Kegiatan	TW 1:	1 Kegiatan	100%	4 Kegiatan monitoring yang dilakukan disetiap triwulan selama 1 tahun		
				TW 2:	100%	TW 2:	100%				TW 2:	1 Kegiatan	TW 2:	1 Kegiatan	100%			
				TW 3:	100%	TW 3:	100%				TW 3:	1 Kegiatan	TW 3:	1 Kegiatan	100%			
				TW 4:	100%	TW 4:	100%				TW 4:	1 Kegiatan	TW 4:	1 Kegiatan	100%			
		Meningkatnya kualitas laporan kinerja	Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	TW 1:	1 Laporan	TW 1:	1 Laporan	Pada Dinas PMD disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun anggaran	Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring	Persentase kinerja pegawai yang ditindaklanjuti	TW 1:	25%	TW 1:	25%	100%	Tindak lanjut hasil monitoring diukur melalui pencapaian kinerja pegawai berdasarkan PK atas keberhasilan dan kekurangan capaian kinerja di triwulan sebelumnya		
				TW 2:	0 Laporan	TW 2:	0 Laporan				0%	TW 2:	25%	TW 2:	25%		100%	
				TW 3:	0 Laporan	TW 3:	0 Laporan				0%	TW 3:	25%	TW 3:	25%		100%	
				TW 4:	0 Laporan	TW 4:	0 Laporan				0%	TW 4:	25%	TW 4:	25%		100%	
			TW 1:	1 Laporan	TW 1:	1 Laporan	Pada Dinas PMD terdapat 17 Pegawai yang telah bekerja sesuai target SKP dan telah terlaksana sampai akhir tahun anggaran	Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi	Jumlah dokumen yang diverifikasi	TW 1:	6 Dokumen	TW 1:	6 Dokumen	100%	Dokumen PK, Rencana Aksi, Pokin, Cascading, SOP dan LKJIP			
			TW 2:	0 Laporan	TW 2:	0 Laporan				0%	TW 2:	0 Dokumen	TW 2:	0 Dokumen		0%		
			TW 3:	0 Laporan	TW 3:	0 Laporan				0%	TW 3:	0 Dokumen	TW 3:	0 Dokumen		0%		
			TW 4:	0 Laporan	TW 4:	0 Laporan				0%	TW 4:	0 Dokumen	TW 4:	0 Dokumen		0%		
			TW 1:	1 Laporan	TW 1:	1 Laporan	Pada Dinas PMD terdapat 17 Pegawai yang telah bekerja sesuai target SKP dan telah terlaksana sampai akhir tahun anggaran	Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan	TW 1:	1 Laporan	TW 1:	1 Laporan	100%	Dokumen LKJIP			
			TW 2:	0 Laporan	TW 2:	0 Laporan				0%	TW 2:	0 Laporan	TW 2:	0 Laporan		0%		
			TW 3:	0 Laporan	TW 3:	0 Laporan				0%	TW 3:	0 Laporan	TW 3:	0 Laporan		0%		
			TW 4:	0 Laporan	TW 4:	0 Laporan				0%	TW 4:	0 Laporan	TW 4:	0 Laporan		0%		
Bidang Pemerintahan Desa																		
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa mandiri	TW 1:	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor desa	Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	TW 1:	Menyusun 1 dokumen pendataan sarana dan prasarana	TW 1:	1 dokumen	Di Kabupaten Gowa terdapat 121 Desa yang dikunjungi	Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	TW 1:	0%	TW 1:	0%	0%	Di Kabupaten Gowa terdapat 121 Desa Sarana dan Prasaran Kantor Desa yang berfungsi dengan baik	
		TW 2:			Melakukan koordinasi dengan 60 pemerintah desa	TW 2:	60 Desa	100%				TW 2:	0%	TW 2:	0%			0%
		TW 3:			Melakukan koordinasi dengan 61 pemerintah desa	TW 3:	61 Desa	100%				TW 3:	0%	TW 3:	0%			0%
		TW 4:			43.80%	TW 4:	100%	TW 4:				100%	100%	TW 4:	100%			TW 4:
Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa																		
			Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	TW 1:	24.79% (30 Desa)	TW 1:	24.79% (30 Desa)	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan lokal mereka	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	TW 1:	0%	TW 1:	0%	0%	Di Kabupaten Gowa terdapat 121 Desa yang melaksanakan kegiatan gotong-royong	
					TW 2:	24.79% (30 Desa)	TW 2:	24.79% (30 Desa)				100%	TW 2:	0%	TW 2:	0%		0%
					TW 3:	24.79% (30 Desa)	TW 3:	24.79% (30 Desa)				100%	TW 3:	0%	TW 3:	0%		0%
					TW 4:	25.62% (31 Desa)	TW 4:	25.62% (31 Desa)				100%	TW 4:	100%	TW 4:	100%		100%
									Meningkatnya keterwakilan unsur masyarakat dalam	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan	TW 1:	0%	TW 1:	0%	0%	Terdapat 22 Keterwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah di		
											TW 2:	0%	TW 2:	0%	0%			
											TW 3:	13.64%	TW 3:	13.64%	100%			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Penjelasan Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Penjelasan Kinerja
									pelaksanaan musyawarah desa	musyawarah desa	TW 4: 13.64%	TW 4: 13.64%	100%	tingkat desa
			Meningkatnya status kemandirian BUMDesa	Persentase kemandirian BUMDesa	TW 1: Melaksanakan pendataan (profil BUMDes, aspek usaha, aset, modal, kelembagaan serta laba (bersih dan kotor))	TW 1: 1 Kegiatan	100%	Terdapat 121 BUMDesa yang terdata di Kabupaten Gowa, Ditargetkan 20 BUMDesa Mandiri	Meningkatnya jumlah unit usaha BUMDesa	Persentase unit usaha BUMDesa yang aktif	TW 1: 0%	TW 1: 0%	0%	Terdapat 242 Unit Usaha BUMDes yang terdata di Kabupaten Gowa
					TW 2: 16.53%	TW 2: 10.00%	60.50%				TW 2: 0%	TW 2: 0%	0%	
					TW 3: Melaksanakan pendataan aspek laba (kotor dan bersih)	TW 3: 1 Kegiatan	100%				TW 3: 0%	TW 3: 0%	0%	
					TW 4: 16.53%	TW 4: 10.00%	60.50%				TW 4: 49.59%	TW 4: 88.84%	179.16%	
									Meningkatnya pendapatan BUMDesa	Persentase pendapatan BUMDesa	TW 1: 0%	TW 1: 0%	0%	Total keseluruhan PAD BUMDes setelah tutup buku terhadap penyertaan modal dalam 1 tahun anggaran
											TW 2: 0%	TW 2: 0%	0%	
											TW 3: 0%	TW 3: 0%	0%	
											TW 4: 17.69%	TW 4: 5.37%	30.36%	
Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Desa														
			Meningkatnya Lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	TW 1: Melakukan pendataan lembaga kemasyarakatan Desa	TW 1: 1 Dokumen	100%	Terdapat 1127 lembaga (167 PKK, 793 Posyandu dan 167 LPM) yang dilakukan pembinaan	Tersedianya LPM berprestasi	Persentase LPM berprestasi	TW 1: 0%	TW 1: 0%	0%	
					TW 2: Menyusun 1 dokumen pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	TW 2: 1 Dokumen	100%				TW 2: 0%	TW 2: 0%	0%	
					TW 3: 50% (793 Posyandu)	TW 3: 50%	100%				TW 3: 13.22%	TW 3: 7.44%	56.26%	16 LPM dari 121 Desa di Kabupaten Gowa
					TW 4: 50% (167 PKK dan 167 LPM)	TW 4: 50%	100%				TW 4: 0%	TW 4: 0%	0%	
									Tersedianya PKK aktif	Persentase PKK aktif	TW 1: 100%	TW 1: 100%	100%	Terdapat 186 PKK di Kabupaten Gowa
											TW 2: 0%	TW 2: 0%	0%	
											TW 3: 0%	TW 3: 0%	0%	
											TW 4: 0%	TW 4: 0%	0%	
									Tersedianya Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	Persentase Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	TW 1: 100%	TW 1: 100%	100%	Terdapat 121 BPD aktif di Kabupaten Gowa
											TW 2: 0%	TW 2: 0%	0%	
											TW 3: 0%	TW 3: 0%	0%	
											TW 4: 0%	TW 4: 0%	0%	
									Tersedianya posyandu mandiri	Persentase posyandu mandiri	TW 1: 35.94%	TW 1: 34.68%	96.49%	Terdapat 793 Posyandu di Kabupaten Gowa
											TW 2: 0%	TW 2: 0%	0%	
											TW 3: 0%	TW 3: 0%	0%	
											TW 4: 0%	TW 4: 0%	0%	



Sungguminasa, 08 Januari 2024

Kepala DPMMD

MUHAMMAD BASIR. S.Sos., M.AP.

Bangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19690705 199009 1 002



**RENCANA AKSI
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Jl. Mesjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Kinerja			
Sekretariat Dinas													
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	TW 1:	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	TW 1:	25%	Pada Dinas PMD terdapat 4 program yang tertuang dalam RKA, yang akan dilaksanakan di tahun 2024	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan	TW 1:	1 Dokumen	Dokumen RKA	
		TW 2:			TW 2:					TW 2:			Dokumen Renja dan RKA Perubahan
		TW 3:			TW 3:					TW 3:			
		TW 4: A			TW 4:					TW 4:			
					Meningkatnya kualitas laporan kinerja	Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	TW 1: 1 Laporan	Pada Dinas PMD disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun anggaran	Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi	Jumlah dokumen yang diverifikasi	TW 1: 6 Dokumen	Dokumen PK, Rencana Aksi, Pokin, Cascading, SOP dan LKJIP	
									Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan	TW 1: 1 Laporan	Dokumen LKJIP	
					Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai	Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	TW 1: 100% TW 2: 100% TW 3: 100% TW 4: 100%	Pada Dinas PMD terdapat 17 pegawai dengan target kinerja berdasar pada SKP	Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan	Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi	TW 1: 1 Kegiatan TW 2: 1 Kegiatan TW 3: 1 Kegiatan TW 4: 1 Kegiatan	4 Kegiatan monitoring yang dilakukan disetiap triwulan selama 1 tahun	
									Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring	Persentase kinerja pegawai yang ditindaklanjuti	TW 1: 25.00% TW 2: 25.00% TW 3: 25.00% TW 4: 25.00%	Tindak lanjut hasil monitoring diukur melalui pencapaian kinerja pegawai berdasarkan PK atas keberhasilan dan kekurangan capaian kinerja di triwulan sebelumnya	
		Bidang Pemerintahan Desa											
		Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa mandiri	TW 1:	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor desa	Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	TW 1:	Menyusun 1 dokumen pendataan sarana dan prasarana	Di Kabupaten Gowa terdapat 121 Desa yang dikunjungi	Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa	Cakupan sarana dan prasaran perkantoran pemerintah desa yang baik	TW 1:	Di Kabupaten Gowa terdapat 121 Desa dengan Sarana dan Prasaran Kantor Desa yang berfungsi dengan baik
				TW 2:			TW 2:					TW 2:	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Kinerja
		TW 3:			TW 3: Melakukan koordinasi dengan 61 pemerintah desa				TW 3:	
		TW 4: 52.07%			TW 4: 100%				TW 4: 100.00%	
Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa										
			Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	TW 1: 24.79% (30 Desa) TW 2: 24.79% (30 Desa) TW 3: 24.79% (30 Desa) TW 4: 25.62% (31 Desa)	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan lokal mereka	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	TW 1: TW 2: TW 3: TW 4: 100.00%	Di Kabupaten Gowa terdapat 121 Desa yang melaksanakan kegiatan gotong-royong
							Meningkatnya keterwakilan unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa	TW 1: TW 2: TW 3: 13.64% TW 4: 13.64%	Terdapat 22 Keterwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah di tingkat desa
			Meningkatnya status kemandirian BUMDesa	Persentase kemandirian BUMDesa	TW 1: Melaksanakan pendataan (profil BUMDes, aspek usaha, aset, modal, kelembagaan serta laba (bersih dan kotor)) TW 2: 33.06% TW 3: Melaksanakan pendataan aspek laba (kotor dan bersih) TW 4: 33.06%	Terdapat 121 BUMDesa yang terdata di Kabupaten Gowa, Ditargetkan 40 BUMDesa Mandiri	Meningkatnya jumlah unit usaha BUMDesa	Persentase unit usaha BUMDesa yang aktif	TW 1: TW 2: TW 3: TW 4: 50.00%	Terdapat 242 Unit Usaha BUMDes yang terdata di Kabupaten Gowa
							Meningkatnya pendapatan BUMDesa	Persentase pendapatan BUMDesa	TW 1: TW 2: TW 3: TW 4: 17.81%	Total keseluruhan PAD BUMDes setelah tutup buku terhadap penyertaan modal dalam 1 tahun
Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Desa										
			Meningkatnya Lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	TW 1: Melakukan pendataan lembaga kemasyarakatan Desa TW 2: Menyusun 1 dokumen pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terdapat 1127 lembaga (167 PKK, 793 Posyandu dan 167 LPM) yang dilakukan pembinaan	Tersedianya LPM berprestasi	Persentase LPM berprestasi	TW 1: TW 2:	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Kinerja
					TW 3: 50% (793 Posyandu)				TW 3: 13.22%	16 LPM dari 121 Desa di Kabupaten Gowa
					TW 4: 50% (167 PKK dan 167 LPM)				TW 4:	
							Tersedianya PKK aktif	Persentase PKK aktif	TW 1: 100.00%	Terdapat 186 PKK di Kabupaten Gowa
									TW 2:	
									TW 3:	
									TW 4:	
							Tersedianya Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	Persentase Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	TW 1: 100.00%	Terdapat 121 BPD aktif di Kabupaten Gowa
									TW 2:	
									TW 3:	
									TW 4:	
							Tersedianya posyandu mandiri	Persentase posyandu mandiri	TW 1: 37.20%	Terdapat 793 Posyandu di Kabupaten Gowa
									TW 2:	
									TW 3:	
									TW 4:	



 Sungguminasa, 04 Januari 2024
 Kepala DPMD
MUHAMMAD BASIR. S.SOs., M.AP.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19690705 199009 1 002



**CASCADING /
POHON KINERJA /
CROSSCUTTING**



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Mesjid Raya No. 30 Lantai II Tlp.(0411) 880 247 Sungguminasa

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026**

NOMOR : 000.9.6.3/019/DPMD

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 410/085a/IV/DPMD/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 (Berita Daerah Kab. Gowa Tahun 2020 Nomor 55);
16. Keputusan Bupati Gowa Nomor 495/XII/2020 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gowa Tahun 2021.
17. Keputusan Bupati Gowa Nomor 448/IX/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal : 07 Agustus 2023



KEPALA DINAS,

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690705 199009 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai Laporan) di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah;
4. Arsip.

LAMPIRAN : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 410/085a/IV/DPMD/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026

NOMOR : 000.9.6.3/019/DPMD

TANGGAL : 07 AGUSTUS 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN GOWA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$	Dinas PMD



KEPALA DINAS,

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690705 199009 1 002

The logo of Universitas GOWA is a shield-shaped emblem. It features a central sun with rays, a green tree, and a white bird. The shield is bordered by green leaves and yellow laurel. The word "GOWA" is written in white at the bottom of the shield.






SOP PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

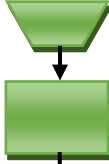






PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAN DAN DESA

Nomor SOP	: 400.10.1/037/II/DPMD/2023
Tgl. Pembuatan	: 07 Februari 2023
Tgl. Revisi	: 07 Februari 2023
Tgl. Pengesahan	: 07 Februari 2023
Disahkan oleh	:  Mengesahkan; KEPALA DPMD KAB. GOWA MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19690705 199009 1 002
Nama SOP	: Penyusunan Laporan Kinerja
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik- Peraturan Presiden Tahun 2014 Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana- Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Mengetahui Tugas dan Fungsi Dalam Pembuatan Laporan Kinerja

Keterkaitan :	Peralatan / perlengkapan :
	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar Kerja/Rencana Aksi - Komputer/Printer - Jaringan Internet - Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Keterlambatan penyampaian data kinerja akan mempengaruhi pelaporan kinerja secara keseluruhan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kabid	Kasi	Pengolah Data	Kasubag Perencanaan & Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan kasi untuk menyusun laporan data kinerja bidang setiap tanggal 10 awal triwulan					Indikator sasaran	10 Menit	Disposisi	Data Kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing
2	Memerintahkan pengolah data mengumpulkan bahan laporan kinerja		  			Disposisi	5 Menit	Disposisi	-

3	Menyerahkan bahan laporan kinerja pada kasi					Disposisi	3 Jam	Bahan laporan data kinerja	-
4	Membuat laporan data kinerja					Bahan Laporan	1 hari	Laporan pengaduan masyarakat	-
5	Memeriksa laporan kinerja. Jika disetujui diserahkan pada kasi untuk diserahkan pada sub bagian program dan didokumentasikan, jika tidak dikembalikan kepada kasi untuk diperbaiki					Laporan Kinerja	1 jam	Laporan Disposisi	-
6	Mendokumentasikan laporan kinerja setiap triwulan dan menyusun kinerja setiap tahun menggunakan laporan kinerja					Laporan Kinerja	1 hari untuk penyusunan laporan triwulan dan 15 hari untuk laporan Kinerja tahunan	Laporan triwulan dan Laporan Kinerja	-